

**DINAMIKA KEPENTINGAN POLITIK DALAM UPAYA
MERUBAH PERATURAN WALIKOTA NOMOR 438
TAHUN 2018 TENTANG LOKASI DAN PENGATURAN
PENGOPERASIAN JAM OPERASIONAL (PKL) DI
PASAR RAYA KOTA PADANG TAHUN 2023**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Oleh :

Angga Oktrianda

2010833012



DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dinamika kepentingan politik dalam upaya merubah Peraturan Wali Kota Nomor 438 Tahun 2018 mengenai lokasi dan pengaturan jam operasional Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya Padang Tahun 2023. Penelitian ini dilatarbelakangi melihat bagaimana suatu kelompok kepentingan pedagang toko memiliki perbedaan tuntutan dengan kelompok kepentingan lainnya yaitu PKL dalam sebuah konflik yang mana mereka memperjuangkan kepentingannya dalam tuntutan perubahan Perwako, sehingga kelompok kepentingan khususnya pedagang toko menilai tidak efektifnya peraturan tersebut agar pembuat kebijakan merespon dengan berencana akan mencabut ataupun mengevaluasi kebijakan tersebut sesuai dengan tuntutan. Peneliti menggunakan konsep Ekonomi Politik Kelembagaan dari Douglas C. North, yang berfokus pada tiga indikator utama, yaitu aturan formal, aturan informal, dan penegakan aturan. Noorth mengungkapkan bahwa institusi menekankan pentingnya institusi dalam mengatur interaksi sosial dan ekonomi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus, sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Wali Kota (Perwako) ini bertujuan untuk menata PKL dalam rangka menciptakan kenyamanan, keteraturan, dan kebersihan lingkungan di kawasan perkotaan. Dengan penataan ini, diharapkan ada keseimbangan antara aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh PKL dan fungsi kota sebagai tempat tinggal dan beraktivitas. Serta dalam pengaruh dinamika kepentingan politik cenderung memainkan peran besar dalam menentukan kebijakan seperti ini, dimana dalam peran politik yang ada penelitian ini bahwa dinamika kepentingan politik antara PKL dengan pedagang toko yaitu adanya proses perubahan peraturan sarat dengan nuansa politis terutama menjelang momen-momen politik seperti pilkada, dimana keberpihakan kepada PKL sering dijadikan komoditas politik. Maka dengan itu, turut mempengaruhi interaksi antara PKL, pedagang toko, dan pemerintah, yang pada akhirnya mempengaruhi implementasi kebijakan penataan PKL di kawasan perkotaan.

Kata Kunci : Konflik Kepentingan, Ekonomi Politik Kelembagaan, Penataan PKL, Kebijakan Kota

ABSTRACT

This research aims to describe the dynamics of political interests in efforts to change Mayor Regulation Number 438 of 2018 concerning Locations and Operational Hours for Street Vendors (PKL) at Pasar Raya Padang in 2023. This research is motivated by seeing how interest groups of shop traders have different demands- different. There was a conflict with other interest groups, namely street vendors, where they fought for their interests in demanding changes to the Perwako, so that interest groups, especially shop traders, considered the regulation ineffective, so policy makers responded by planning to revoke or evaluate the regulation. Policies according to demands. Researchers use the concept of Institutional Political Economy from Douglas C. North which emphasizes three indicators, namely Formal Rules, Informal Rules, and Rule Enforcement. This research approach is qualitative with a case study research design. Data collection techniques include interviews and documentation. The research results show that this Mayor's Regulation (Perwako) aims to organize street vendors to create comfort, order and cleanliness in urban environments. And in the influence of the dynamics of political interests tend to play a major role in determining policies like this, where in the political role in this study that the dynamics of political interests between street vendors and street vendors is the process of regulatory changes that are full of political nuances, especially ahead of political moments such as regional head elections, where partisanship towards street vendors is often found as a political commodity. Therefore, it also influences the interaction between street vendors, street vendors, and the government which ultimately influences the implementation of street vendor management policies in urban areas.

Keywords : Conflict of interest, Institutional Political Economy, Arrangement of street vendors, City Policy

